



# **GOSORA**

## **GERAKAN ORIENTASI EKSPOR UNTUK RAKYAT SEJAHTERA**

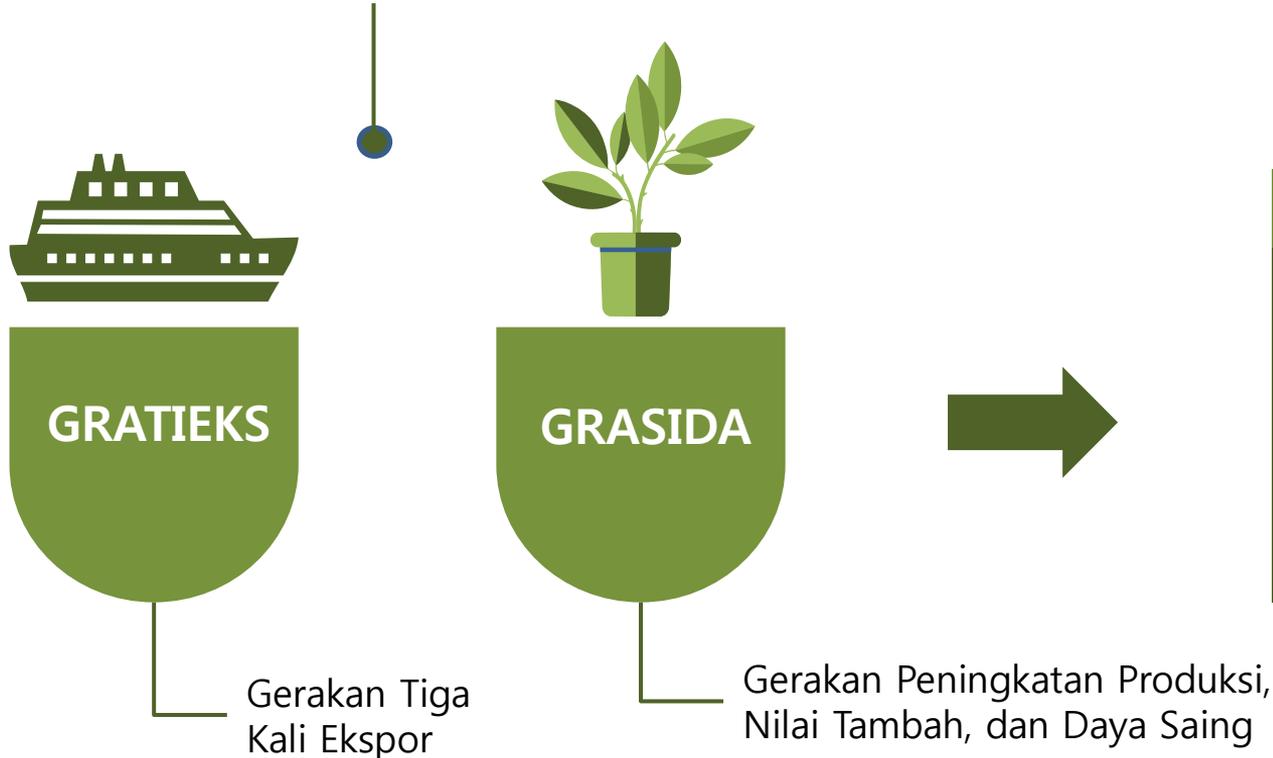
**Penguatan Ekonomi Lokal di Maluku Utara  
Berbasis Komoditas Unggulan  
Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional**

**Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara**

# PENDAHULUAN



## Program Kementerian Pertanian 2020 - 2024



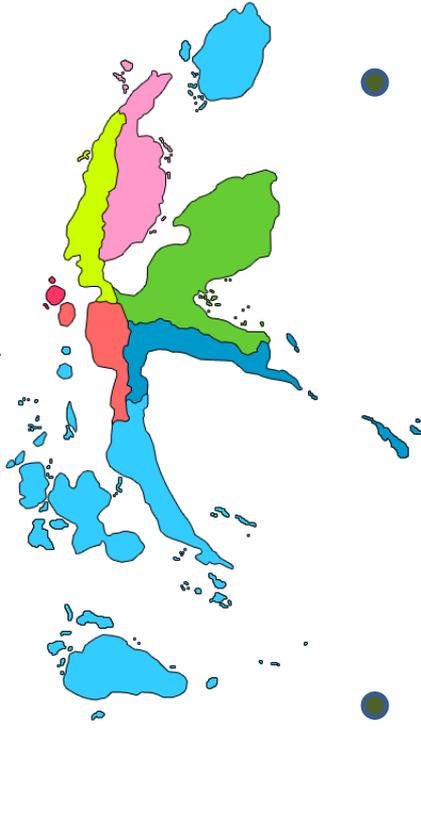
### 7 Komoditas Unggulan

- Kopi
- Kakao
- **Kelapa**
- Jambu mete
- Lada
- **Pala**
- vanili

# PENDAHULUAN

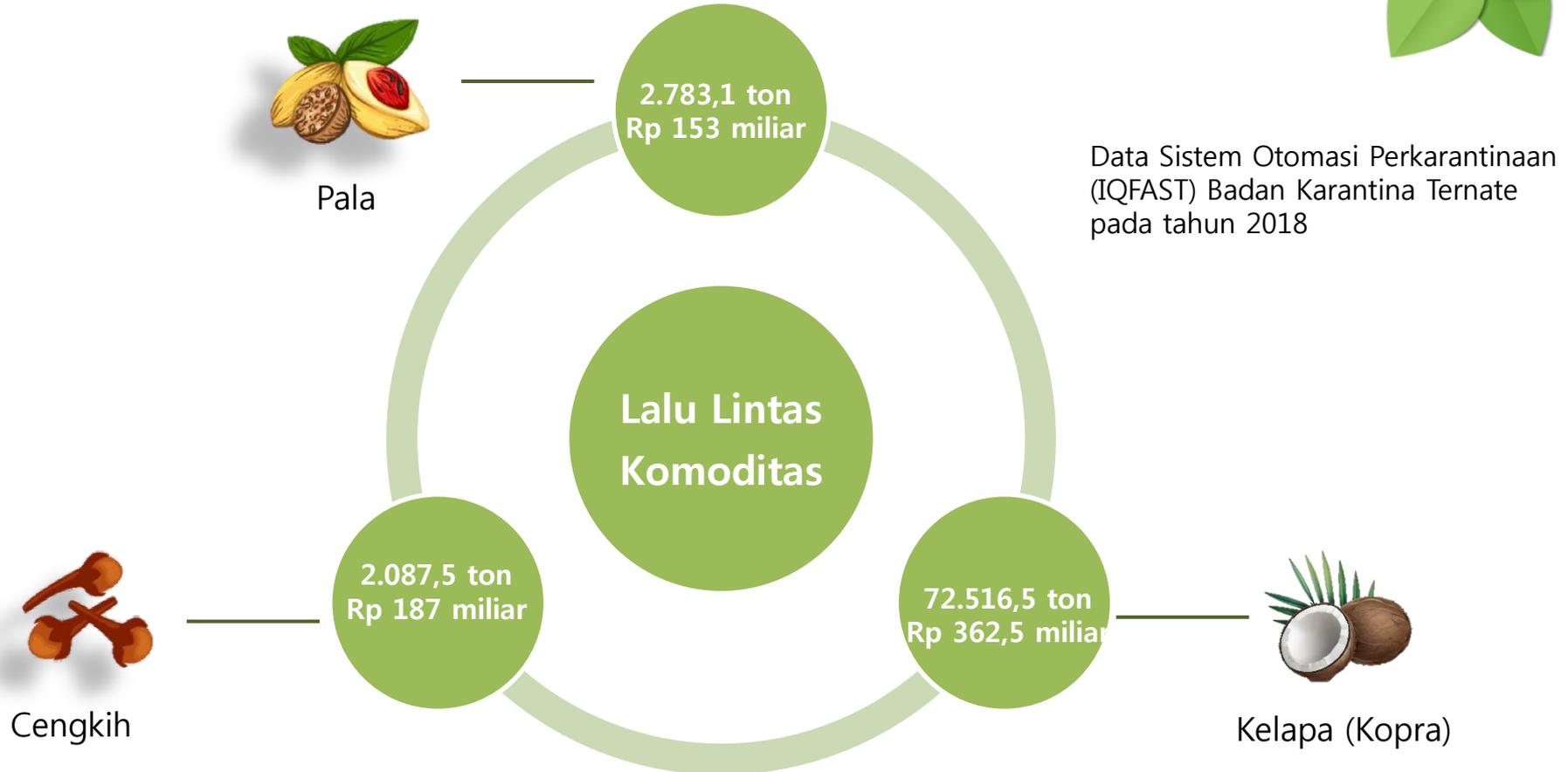


## PROVINSI MALUKU UTARA



- Mayoritas wilayah Maluku Utara merupakan gunung dan perbukitan, yang terdiri dari pulau-pulau vulkanis dan pulau karang
- Karakteristik wilayah inilah yang menjadikan Maluku Utara memiliki keistimewaan komoditas pertanian dan perkebunan
- Komoditas asli Maluku Utara termasuk dalam komoditas andalan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan seperti pala, cengkih, dan kelapa.
- Hasil Musrenbang Pertanian Maluku Utara 2019 telah disepakati bahwa komoditas pala, cengkih, dan kelapa menjadi fokus pengembangan dalam upaya mengembalikan kejayaan rempah nusantara.

# PENDAHULUAN



# PENDAHULUAN

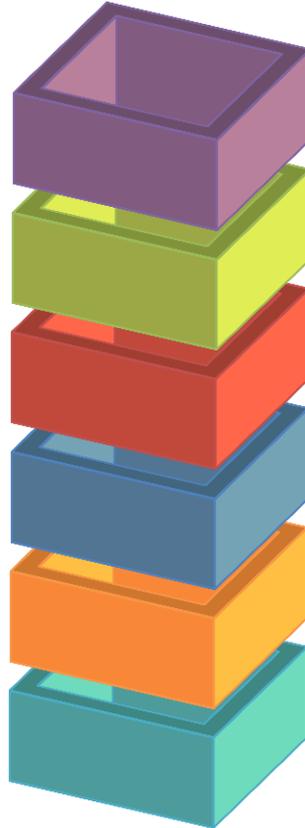


## Permasalahan dan Tantangan

Kurang kuatnya posisi dan daya tawar petani dan pekebun penghasil rempah dibanding pembeli (pedagang pengumpul) yang lebih memiliki kuasa dalam menentukan harga.

Jika ada notifikasi buruknya kualitas produk komoditas (karena racun atau jamur), tuduhan ditujukan kepada petani dan pekebun dari Maluku Utara yang dinilai tidak memiliki penanganan produk yang baik.

Situasi lain yang dihadapi adalah petani dan pekebun di Maluku Utara sama dengan petani di wilayah lain, tidak memiliki akses terhadap modal jika hendak melakukan diversifikasi produk.

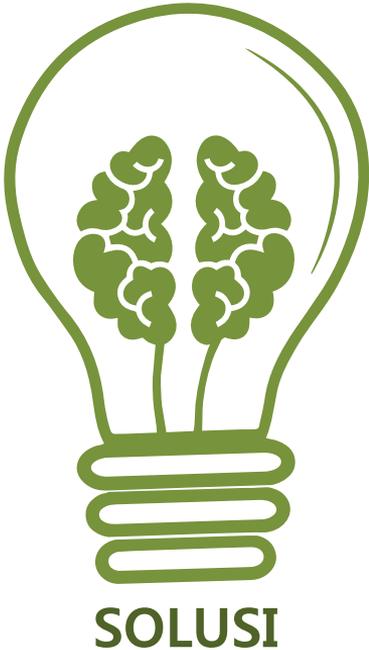


Tingginya serapan komoditas keluar Maluku Utara tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan petani dan pekebun.

Tidak adanya standar harga dan acuan pengecekan mutu menjadikan pelaku usaha di lini tengah menetapkan harga yang tidak transparan.

Selain itu, hingga saat ini petani dan pekebun sebagai penghasil komoditas dan Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab wilayah tidak mengetahui secara pasti tujuan akhir dari komoditas pertanian dan perkebunan yang diserap dari Maluku Utara.

# PENDAHULUAN

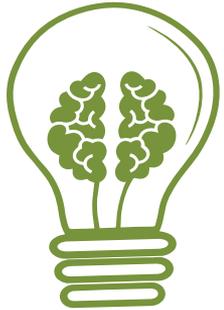


Pemerintah hadir untuk melindungi kelestarian komoditas unggulan Maluku Utara dan menjaga kehidupan masyarakat.

Dalam mendorong perbaikan dan peningkatan ekonomi di sektor pertanian dan perkebunan perlu keterlibatan multi-pihak, yaitu antara Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan penyedia layanan maupun infrastruktur, petani dan pedagang kecil sebagai pemilik bahan baku, serta pelaku usaha berskala menengah dan besar sebagai perantara kepada konsumen.

Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara hendak menginisiasi program yang dapat menyinergikan kekuatan lintas sektor dan kerjasama multi-pihak, yaitu Gerakan Orientasi Ekspor untuk Rakyat Sejahtera (GOSORA).

# TUJUAN



1.Menguatkan potensi komoditas pertanian dan perkebunan di seluruh wilayah Maluku Utara;

1.Meningkatkan mutu komoditas dan daya saing produk pertanian dan perkebunan Maluku Utara;

1.Melindungi keberlanjutan produksi komoditas pertanian dan perkebunan unggulan Maluku Utara;

Meningkatkan kesejahteraan petani dan pekebun di Maluku Utara.

# LANGKAH



1. Memetakan mutu dan ketertelusuran komoditas unggulan di setiap wilayah kabupaten / kota di Maluku Utara;

Mengembangkan model kelembagaan badan usaha yang berbasis bisnis sosial untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal berbasis hasil perkebunan.

# GOSORA DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL



## MASYARAKAT

Pengembangan ekonomi lokal mewujudkan harapan masyarakat menjadi kenyataan dengan mengintegrasikan kebutuhan penduduk dan pengembangan sektor usaha, dengan tujuan pembangunan daerah.

## KEPALA DAERAH

Pengembangan ekonomi lokal lebih dari sekedar program kerja, namun melibatkan masyarakat pada visi bersama dan menciptakan kebijakan untuk meningkatkan vitalitas bisnis dan meningkatkan standar hidup.

## PERSPEKTIF PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

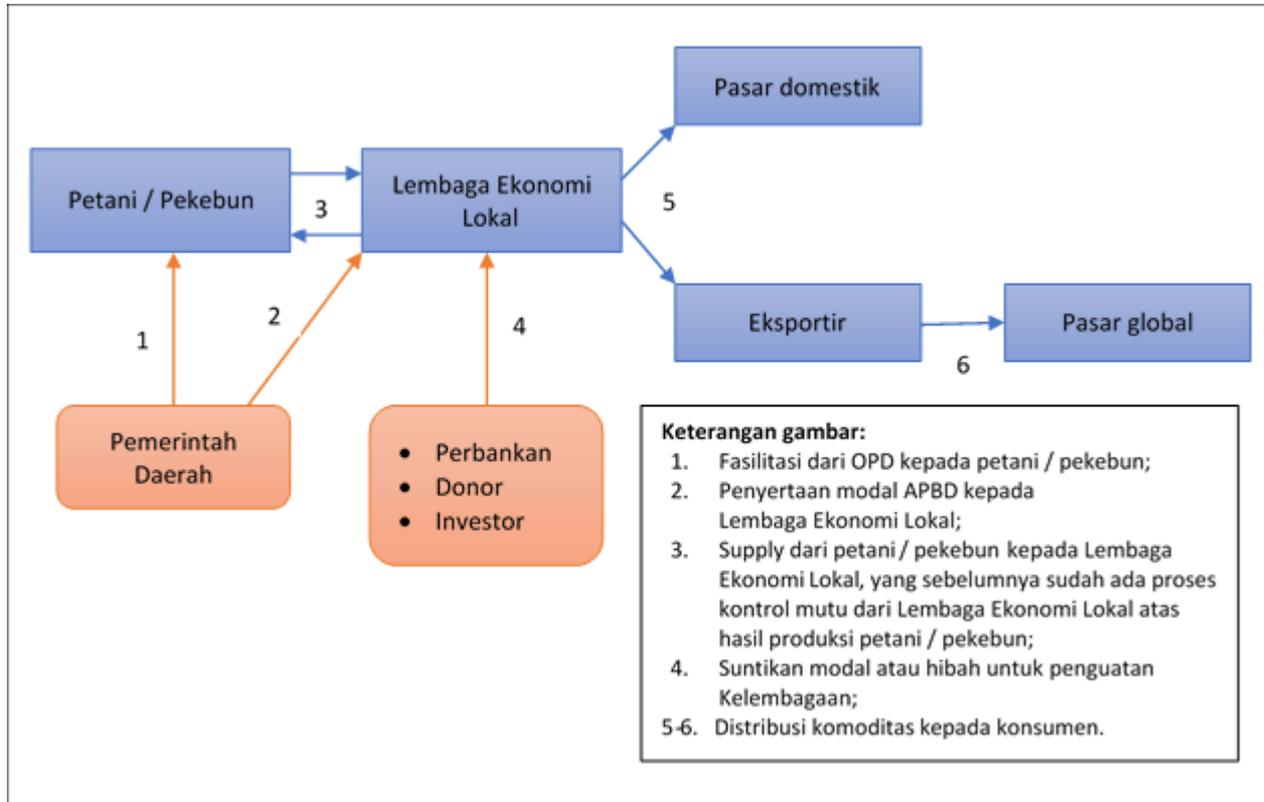
## ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pembangunan ekonomi lokal melibatkan seluruh sumber daya yang secara positif mempengaruhi aktivitas bisnis, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan kesinambungan fiskal.

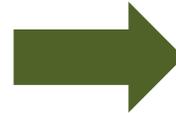
## SEKTOR USAHA

Pengembangan ekonomi lokal, termasuk di dalamnya sektor publik dan sektor swasta, saling bekerja bersama untuk berkembang bersama.

# USULAN SKEMA RANTAI PASOK KOMODITAS PERKEBUNAN MALUKU UTARA



# PEMETAAN MUTU DAN KETERTELUSSURAN KOMODITAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN



Peningkatan kuantitas dan kualitas kebutuhan pasar domestik hingga pasar global sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

# BLUD (BADAN LAYAN UMUM DAERAH)



Bentuk kelembagaan yang mengakomodasi kedua fungsi bisnis dan fungsi sosial yaitu Badan Layanan Umum (BLUD)

Menurut PP No. 23 tahun 2005  
tentang Pengelolaan  
Keuangan BLU/BLUD

BLU merupakan instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengelolaan keuangan BLU/BLUD memiliki fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Hak BLU/BLUD

Fleksibilitas pelaksanaan anggaran, mempekerjakan tenaga profesional non-PNS, memberi remunerasi kepada Pegawainya.

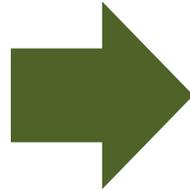
Kewajiban BLU/BLUD

Meningkatkan: kinerja pelayanan; kinerja keuangan; manfaat bagi masyarakat; menghitung harga pokok layanannya dengan baku mutu yang ditetapkan Menteri teknis pembina; menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya sesuai standar akuntansi keuangan yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

# BLUD (BADAN LAYAN UMUM DAERAH)



**Asas BLU/BLUD  
(PP No. 23 / 2005)**



1. BLU/BLUD menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
2. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU/BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan
3. BLU/BLUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.



3 asas ini memperjelas bahwa bentuk kelembagaan BLUD untuk Lembaga Ekonomi Lokal yang dibutuhkan dalam skema GOSORA.

# BLUD (BADAN LAYAN UMUM DAERAH)



## STRENGTH (KEKUATAN)

1. Fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran dan otonomi;
2. Sistem kelembagaannya berpeluang merubah birokrasi pemerintah
3. BLUD beroperasi berdasarkan asas; a) Transparansi.; b) Akuntabilitas ; c) Responsibilitas; d) Independensi.
4. BLUD mempunyai standar pelayanan minimal
5. BLU/BLUD wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual (SAP Akrual)
6. BLUD berstatus penuh diberi fleksibilitas pengelolaan keuangan, me liputi dapat langsung menggunakan seluruh pendapatan yang diper olehnya, selain dana yang bersumber dari APBN/APBD—tanpa terlebih dahulu disetorkan ke Rekening Kas Negara/Daerah

## WEAKNESS (KELEMAHAN)

1. Memerlukan peningkatan kemampuan dan kapasitas manajerial para pimpinan eksekutif BLUD agar mampu membawa BLUD menjadi organisasi sektor publik dengan kinerja sektor swasta.
2. Otoritas dan fleksibilitas BLUD menjadi sebuah dilema bagi eksistensi BLUD jika pemimpin yang ditunjuk tidak memiliki integritas yang tinggi.
3. Tidak adanya penetapan nomenklatur kelembagaan BLUD memungkinkan ketidakjelasan identitas dan berdampak pada keterjebakan dalam sistem pengelolaan yang birokratis, hierarkis, lambat serta jauh dari aspek profesionalitas.
4. Pengaturan kompensasi dalam bentuk remunerasi yang tidak tepat mempengaruhi keberlanjutan dan kualitas layanan BLUD
5. BLUD fokus dalam menyediakan layanan jasa/produk tanpa mengutamakan keuntungan yang bersifat ekonomi. Keuntungan yang boleh didapatkan hanya biaya untuk penyediaan layanan jasa/produk.

# BLUD (BADAN LAYAN UMUM DAERAH)



## OPPORTUNITY (PELUANG)

1. Pendapatan BLUD terdiri dari beberapa skema pendapatan yang meliputi; a) Jasa layanan; b) Hibah terikat dan hibah tidak terikat; c) Hasil kerja sama dengan pihak lain; d) APBD, (bukan dari kegiatan pembiayaan APBD); e) APBN; f) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Banyak skema pendapatan memberikan peluang BLUD dapat lebih mengeksplorasi peluang kerjasama dalam meningkatkan pelayanan produk/jasa terhadap masyarakat.
2. BLUD merupakan sebuah Lembaga yang memiliki perspektif bisnis dan sosial, sesuai dalam Upaya meningkatkan kualitas produk, serta meningkatkan akses pasar dan modal komoditas pala, cengkik, dan kelapa di Provinsi Maluku Utara.

## THREAT (ANCAMAN)

1. Sistem BLUD yang tidak memungkinkan mendapatkan keuntungan secara bisnis menjadi hal yang sulit untuk bersaing dengan instansi swasta dalam memberikan pelayanan produk/jasa.
2. Bentuk organisasi dan pola pengelolaan gabungan antara perspektif bisnis dan sosial memunculkan resistensi eksternal yaitu stakeholder lain yang berkaitan. Resistensi akan menjadi hambatan dalam pembentukan dan keberlanjutan BLUD. Pemahaman yang komprehensif dan penyesuaian terhadap perubahan dapat menjawab tantangan yang dihadapi meliputi, konsep Lembaga Ekonomi Lokal yang jelas dan terciptanya regulasi yang mendasari pembentukan BLUD.

# POTENSI LEMBAGA EKONOMI LOKAL BERBENTUK BLUD PADA SKEMA GOSORA



Lembaga  
Ekonomi  
Lokal  
(BLUD)

**Tujuan :** memberikan layanan jasa/produk secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.



Membantu pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang tertera pada salah satu misi yaitu "**Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan**"

# POTENSI LEMBAGA EKONOMI LOKAL BERBENTUK BLUD PADA SKEMA GOSORA



## Layanan yang dapat ditawarkan:

Lembaga  
Ekonomi  
(BLUD)

Upaya peningkatan kapasitas petani dan pekebun mengenai praktik budidaya hingga penanganan pasca panen, meningkatkan pemahaman petani dan pekebun pada aspek bisnis pertanian dan perkebunan;

1. Menyediakan sarana dan prasarana dengan sistem yang lebih mudah dan terjangkau demi meningkatkan mutu dan kualitas produk pertanian dan perkebunan sesuai dengan standar pasar global;

Membantu petani dan pekebun melakukan ekstensifikasi pasar dari nasional hingga berpotensi mencapai pasar global yang sesuai dengan standar dari negara tujuan;

1. Menjamin produk petani yang diekspor ke pasar global sesuai dengan standar kualitas tertentu melalui sistem ketertelusuran mutu produk pertanian dan perkebunan;

Menyediakan akses modal bagi petani dan pekebun untuk mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan.

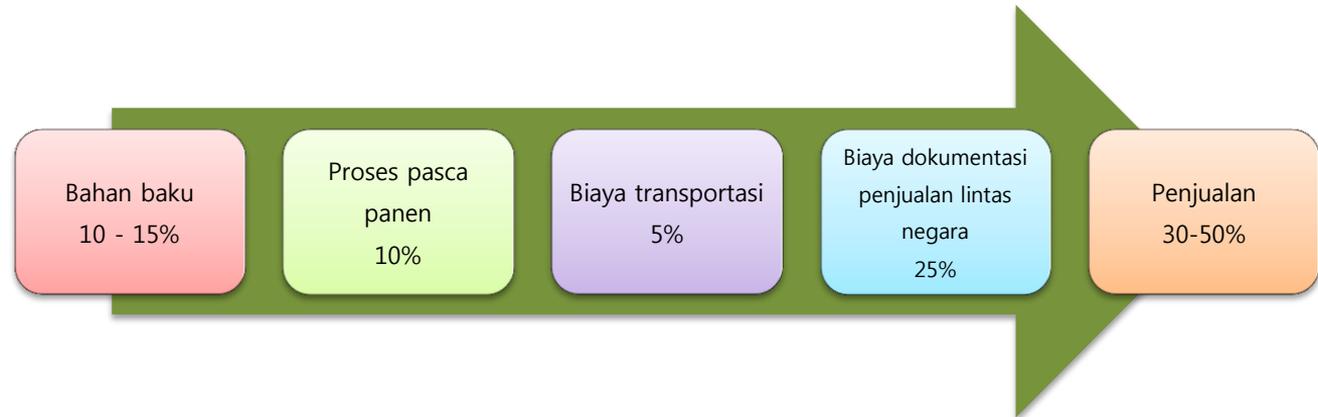
# POTENSI LEMBAGA EKONOMI LOKAL BERBENTUK BLUD PADA SKEMA GOSORA



Lembaga  
Ekonomi  
Lokal  
(BLUD)

BLUD harus dapat menyusun rencana usaha sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas penerimaan penyertaan modal dari APBD maupun investasi. Dalam rencana usaha tersebut ada pendetailan perhitungan komposisi harga dari petani / pekebun hingga konsumen, sehingga dapat diproyeksikan keuntungan yang diperoleh.

Sebagai contoh, dalam gambar berikut disajikan ilustrasi penghitungan komposisi harga komoditas sebagai kontribusi dari setiap tahap atau proses penanganan komoditas.



**TERIMA KASIH**

